

Good Governance dalam Perspektif Global: Studi Sistematis atas Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik

Ferdinan Ronald Siburian^{1*}, Sahrul Pora²

¹ Universitas Terbuka and ferdinanrs17@gmail.com

² Politeknik Perikanan Negeri Tual and sahrulpora28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan global terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, seiring dengan masih adanya kesenjangan kualitas governance di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis literatur terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kerangka good governance secara global. Metodologi yang digunakan adalah systematic literature review dengan pendekatan PRISMA, menggunakan sumber data dari Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan rentang publikasi tahun 2022 hingga 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berperan dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan mengurangi korupsi, akuntabilitas memperkuat pertanggungjawaban kebijakan publik, serta partisipasi publik meningkatkan legitimasi dan kualitas pengambilan keputusan. Pembahasan menunjukkan bahwa ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti kapasitas institusi, perkembangan teknologi, dan kondisi sosial politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan good governance bergantung pada integrasi ketiga prinsip tersebut secara simultan dalam berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Good Governance, Partisipasi Publik, Systematic Literature Review, Transparansi

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing global demand for governance that is transparent, accountable, and participatory, alongside persistent disparities in governance quality across countries. This study aims to analyze and synthesize the literature on transparency, accountability, and public participation within the framework of good governance from a global perspective. The methodology employed is a systematic literature review using the PRISMA approach, drawing data from Scopus, Web of Science, and Google Scholar with a publication range from 2022 to 2026. The results indicate that transparency enhances information openness and reduces corruption, accountability strengthens responsibility in public policy, and public participation improves policy legitimacy and decision-making quality. The discussion reveals that these three principles are interconnected and influenced by contextual factors such as institutional capacity, technological development, and socio-political conditions. The study concludes that the success of good governance depends on the simultaneous integration of these three principles across sectors and levels of governance.

Keywords: Accountability, Good Governance, Public Participation, Systematic Literature Review, Transparency

PENDAHULUAN

Konsep good governance telah menjadi isu sentral dalam kajian administrasi publik dan kebijakan global, terutama seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan bertanggung jawab (Singh, 2023). Good governance tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang menekankan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Widanti, 2022). Dalam konteks global, konsep ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai permasalahan struktural, seperti korupsi, lemahnya institusi, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Halim & Osmani, 2023). Oleh karena itu, good governance menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pemerintahan di berbagai negara (Kaufmann & Kraay, 2024). Perkembangan

globalisasi juga turut mendorong standar tata kelola yang semakin seragam dan terintegrasi lintas negara (Massey, 2022).

Urgensi penerapan prinsip good governance semakin terlihat dari berbagai indikator global yang menunjukkan masih adanya kesenjangan tata kelola antarnegara. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa skor rata-rata Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) global pada tahun 2023 berada di angka 43 dari skala 0–100, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar negara masih menghadapi masalah serius dalam korupsi sektor publik (Transparency International, 2024). Selain itu, laporan World Bank juga menegaskan bahwa lebih dari 25% populasi dunia tinggal di negara dengan tingkat tata kelola yang lemah (World Bank, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas belum diterapkan secara optimal di banyak negara. Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas kebijakan publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan good governance masih menjadi tantangan global yang signifikan.

Transparansi sebagai salah satu pilar utama good governance berperan penting dalam menciptakan keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat (Nurhidayat, 2023). Ketersediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan publik (Ikhsan et al., 2025). Selain itu, transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan (Sari, 2023). Dalam era digital, transparansi semakin didorong melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti e-government dan open data (Handoyo, 2023). Namun demikian, implementasi transparansi tidak selalu berjalan optimal karena masih adanya hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, budaya birokrasi tertutup, dan resistensi terhadap perubahan (Naseer et al., 2025). Oleh sebab itu, transparansi tetap menjadi isu krusial dalam penguatan tata kelola pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang tidak kalah penting dalam mewujudkan good governance, karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pemerintah atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil (Singh, 2023). Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang jelas, baik secara internal maupun eksternal (Widanti, 2022). Dalam praktiknya, akuntabilitas sering dikaitkan dengan sistem pelaporan kinerja, audit publik, serta pengawasan oleh lembaga independen (Halim & Osmani, 2023). Namun, di banyak negara berkembang, implementasi akuntabilitas masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya kapasitas institusi (Ikhsan et al., 2025). Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan (Sari, 2023). Dengan demikian, penguatan akuntabilitas menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan.

Selain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik juga menjadi elemen fundamental dalam good governance (Massey, 2022). Partisipasi publik mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik (Nurhidayat, 2023). Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sari, 2023). Dalam praktik global, partisipasi publik diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti konsultasi publik, forum dialog, dan penggunaan platform digital (Patel et al., 2023). Namun demikian, tingkat partisipasi publik masih sangat bervariasi antarnegara, tergantung pada sistem politik, tingkat

pendidikan masyarakat, dan akses terhadap informasi (Naseer et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan partisipasi publik menjadi tantangan tersendiri dalam konteks global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance (Handoyo, 2023). Digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi melalui penyediaan data terbuka dan layanan publik berbasis online (Ikhsan et al., 2025). Selain itu, teknologi juga memperkuat akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan real-time (Sari, 2023). Di sisi lain, platform digital juga membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (Patel et al., 2023). Meskipun demikian, kesenjangan digital (digital divide) masih menjadi hambatan utama dalam implementasi good governance berbasis teknologi (Naseer et al., 2025). Negara-negara dengan tingkat akses teknologi yang rendah cenderung tertinggal dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, transformasi digital menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam kajian good governance.

Dalam perspektif global, penerapan good governance tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara (Kaufmann & Kraay, 2024). Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Massey, 2022). Faktor seperti stabilitas politik, kapasitas institusi, serta budaya masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan good governance (Halim & Osmani, 2023). Selain itu, peran organisasi internasional seperti World Bank dan UNDP juga turut mendorong standardisasi praktik tata kelola yang baik di berbagai negara (Handoyo, 2023). Namun, pendekatan yang bersifat universal seringkali menghadapi tantangan ketika diimplementasikan dalam konteks lokal (Naseer et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan secara global dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai dimensi good governance dalam konteks global dengan pendekatan yang beragam. Murshed (2024) menemukan bahwa kualitas good governance berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau melalui transisi energi terbarukan di negara-negara berkembang. Handayani et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dan partisipasi publik mampu meningkatkan kinerja pelayanan desa secara signifikan. Benzaken et al. (2022) mengungkapkan bahwa praktik good governance menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan ekonomi biru berkelanjutan di negara kepulauan kecil seperti Seychelles.

Penelitian lain juga menyoroti peran good governance dalam berbagai sektor strategis dan konteks kelembagaan yang berbeda. Hafner-Burton et al. (2025) menjelaskan bahwa bahkan dalam organisasi internasional yang bersifat otokratis, prinsip good governance tetap memiliki peran dalam meningkatkan efektivitas institusi. Toukabri dan Mohamed Youssef (2023) menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memperkuat keterkaitan antara pengungkapan perubahan iklim dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Saha et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola negara memoderasi hubungan antara praktik SDGs dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga memperkuat pentingnya governance dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji good governance dari beragam perspektif, masih terdapat kesenjangan dalam integrasi konseptual yang secara khusus mengkaji tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, dalam satu kerangka

analisis global yang komprehensif. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada sektor atau konteks tertentu, sehingga belum memberikan sintesis menyeluruh mengenai bagaimana ketiga prinsip tersebut berinteraksi dalam praktik good governance lintas negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan systematic literature review (SLR) guna mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis temuan-temuan terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perspektif global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep good governance serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan inklusif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait tata kelola pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA untuk memastikan proses penelusuran, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Pendekatan SLR dipilih karena mampu mengintegrasikan berbagai temuan penelitian sebelumnya secara komprehensif, khususnya dalam mengkaji konsep good governance dari perspektif global. Proses penelitian dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian yang berfokus pada bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dibahas dan diimplementasikan dalam literatur ilmiah. Selanjutnya, dilakukan identifikasi kata kunci utama seperti “good governance”, “transparency”, “accountability”, dan “public participation” yang digunakan dalam proses pencarian literatur. Tahapan ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa literatur yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai basis data ilmiah bereputasi, seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci dan operator boolean (AND, OR) untuk memperluas dan mempersempit hasil pencarian sesuai kebutuhan. Penelusuran literatur dibatasi pada publikasi yang terbit dalam rentang tahun 2022 hingga 2026 guna memastikan relevansi dan kebaruan data. Selain itu, hanya artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terindeks dan memiliki akses teks penuh yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Seluruh hasil pencarian kemudian dikumpulkan dan didokumentasikan untuk tahap seleksi berikutnya.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel ilmiah yang membahas secara langsung konsep good governance atau salah satu dari prinsipnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik; (2) penelitian yang menggunakan pendekatan empiris maupun konseptual; (3) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi dan telah melalui proses peer-review; (4) publikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia; serta (5) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian; (2) publikasi berupa prosiding, laporan singkat, atau opini tanpa dasar ilmiah yang jelas; (3) artikel duplikat yang ditemukan dalam lebih dari satu basis data; serta (4) penelitian yang terbit di luar rentang waktu 2022–2026. Penerapan kriteria ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan relevansi literatur yang dianalisis.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan alur PRISMA, yaitu identifikasi, penyaringan (screening), kelayakan (eligibility), dan inklusi. Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang diperoleh dari basis data dikompilasi dan diperiksa untuk

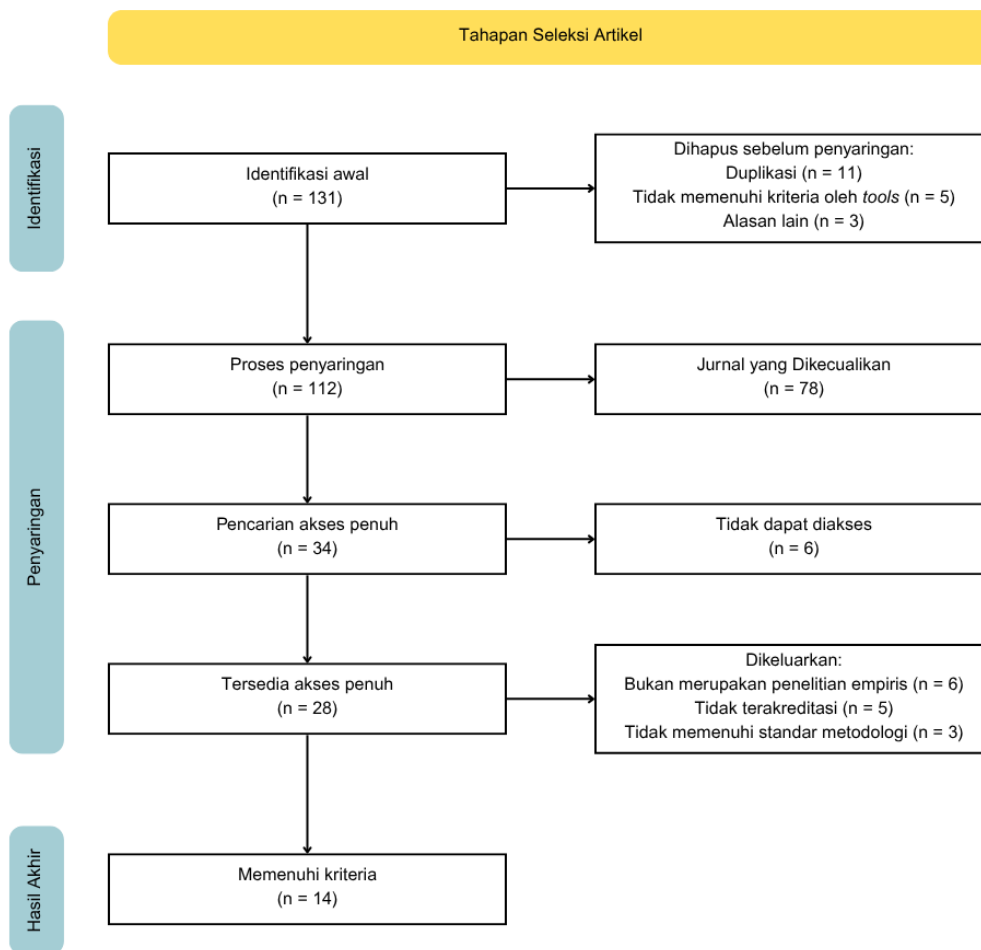
menghapus duplikasi. Selanjutnya, tahap screening dilakukan dengan meninjau judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan topik penelitian. Artikel yang lolos tahap ini kemudian masuk ke tahap eligibility, di mana dilakukan penilaian secara lebih mendalam terhadap isi teks lengkap. Tahap akhir adalah inklusi, yaitu pemilihan artikel yang memenuhi seluruh kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk meminimalkan bias dalam pemilihan literatur.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sintesis tematik (thematic synthesis), dengan mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan tema utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam good governance. Setiap artikel yang terpilih dianalisis untuk mengidentifikasi konsep, metode, serta temuan utama yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menemukan pola, hubungan, serta kesenjangan dalam literatur yang ada. Selain itu, dilakukan interpretasi kritis terhadap temuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi good governance dalam perspektif global. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam terkait topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Sebanyak 131 artikel awal berhasil diidentifikasi dari berbagai basis data ilmiah, termasuk Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Sebelum tahap penyaringan, sebanyak 19 artikel dieliminasi, terdiri dari 11 artikel duplikat, 5 artikel yang secara otomatis tereliminasi karena tidak memenuhi kriteria awal, serta 3 artikel yang dihapus karena kendala teknis atau kesalahan input data. Selanjutnya, sebanyak 112 artikel diseleksi berdasarkan judul dan abstrak, di mana 78 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi, seperti tidak berfokus pada good governance, tidak relevan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, atau menggunakan konteks yang tidak sesuai dengan kajian global. Sebanyak 34 artikel kemudian masuk ke tahap penilaian teks lengkap, namun 6 artikel tidak dapat diakses karena keterbatasan akses atau paywall. Dengan demikian, tersisa 28 artikel yang dianalisis pada tahap kelayakan. Dari jumlah tersebut, 14 artikel dieliminasi dengan alasan: 6 artikel tidak memiliki relevansi tematik yang kuat terhadap fokus penelitian, 5 artikel berasal dari jurnal yang tidak terindeks atau tidak melalui proses peer-review, dan 3 artikel tidak memenuhi standar metodologi yang ditetapkan. Melalui proses seleksi yang sistematis ini, diperoleh 14 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan dalam analisis akhir, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Seleksi PRISMA

Selanjutnya, sebanyak 14 artikel terpilih disajikan secara sistematis dalam Tabel 1 untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Korelasi dengan Penelitian
1	Murshed, M. (2024)	<i>Can renewable energy transition drive green growth? The role of good governance in promoting carbon emission-adjusted economic growth in Next Eleven countries</i>	Kuantitatif (panel data econometric)	Penelitian ini menemukan bahwa good governance memiliki peran signifikan dalam memperkuat hubungan antara transisi energi terbarukan dan pertumbuhan ekonomi hijau. Negara dengan tata kelola yang baik mampu mengoptimalkan dampak positif energi terbarukan terhadap penurunan emisi	Relevan karena menunjukkan pentingnya good governance dalam konteks global dan lintas sektor, serta menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan publik berbasis lingkungan.

				karbon dan peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.	
2	Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023)	<i>Increasing the performance of village services with good governance and participation</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dan partisipasi publik secara signifikan meningkatkan kinerja pelayanan desa. Partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.	Sangat relevan karena secara langsung mengkaji partisipasi publik sebagai salah satu pilar utama good governance yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini.
3	Benzaken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022)	<i>Good governance for sustainable blue economy in small islands: Lessons learned from the Seychelles experience</i>	Kualitatif (studi kasus)	Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan ekonomi biru berkelanjutan di Seychelles sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang baik, termasuk koordinasi antar lembaga, transparansi kebijakan, dan partisipasi pemangku kepentingan.	Relevan karena memberikan gambaran implementasi good governance dalam konteks global dan menunjukkan pentingnya integrasi transparansi dan partisipasi dalam kebijakan publik.
4	Hafner-Burton, E., Pevehouse, J. C., & Schneider, C. J. (2025)	<i>Good governance in autocratic international organizations: E. Hafner-Burton et al.</i>	Kualitatif dan analisis institusional	Penelitian ini menunjukkan bahwa bahkan dalam organisasi internasional yang bersifat otokratis, prinsip good governance tetap diterapkan untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas organisasi.	Relevan karena memperluas perspektif global terkait good governance dan menunjukkan bahwa prinsip seperti akuntabilitas tetap penting dalam berbagai sistem pemerintahan.
5	Toukabri, M., & Mohamed Youssef, M. A. (2023)	<i>Climate change disclosure and sustainable development goals (SDGs) of the 2030 agenda: the moderating role of corporate governance</i>	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa corporate governance berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pengungkapan perubahan iklim dan pencapaian SDGs.	Relevan karena menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

6	Saha, S., Hasan, A. R., Islam, K. R., & Priom, M. A. I. (2024)	<i>Sustainable Development Goals (SDGs) practices and firms' financial performance: Moderating role of country governance</i>	Kuantitatif	Penelitian ini menemukan bahwa kualitas governance negara memperkuat hubungan antara praktik SDGs dan kinerja keuangan perusahaan, menunjukkan peran strategis governance dalam pembangunan ekonomi.	Relevan karena menunjukkan pengaruh good governance pada skala makro dan memperkuat urgensi analisis global dalam penelitian ini.
7	Correa-Mejía, D. A., García-Benau, M. A., & Correa-García, J. A. (2024)	<i>The critical role of corporate governance in sustainable development goals prioritisation: A 5 P s-based analysis for emerging economies</i>	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa corporate governance berperan penting dalam menentukan prioritas SDGs di negara berkembang melalui pendekatan 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership).	Relevan karena menekankan keterkaitan antara governance dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks global.
8	Haghighi, H., & Takian, A. (2024)	<i>Institutionalization for good governance to reach sustainable health development: a framework analysis</i>	Kualitatif (framework analysis)	Penelitian ini mengembangkan kerangka institusionalisasi good governance dalam sektor kesehatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas.	Relevan karena menunjukkan pentingnya prinsip governance dalam sektor publik dan mendukung analisis konseptual penelitian ini.
9	Akpan-Obong, P. I., Trinh, M. P., Ayo, C. K., & Oni, A. (2023)	<i>E-Governance as good governance? evidence from 15 West African countries</i>	Kuantitatif komparatif	Penelitian ini menemukan bahwa e-governance berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi, namun belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas di semua negara.	Relevan karena mengaitkan teknologi dengan prinsip good governance, khususnya transparansi dan partisipasi publik.
10	Maugeri, A., Barchitta, M., Puglisi, F., & Agodi, A. (2023)	<i>Socio-economic, governance and health indicators shaping antimicrobial resistance: an ecological analysis of 30 european countries</i>	Kuantitatif (ecological study)	Hasil menunjukkan bahwa indikator governance memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat resistensi antimikroba, bersama faktor sosial ekonomi dan kesehatan.	Relevan karena menunjukkan dampak governance terhadap sektor kesehatan secara global.
11	Kuzior, A., Pakhnenko, O., Tiutiunyk,	<i>E-governance in smart cities: Global trends and key enablers</i>	Kualitatif dan studi literatur	Penelitian ini mengidentifikasi tren global e-governance dalam smart cities serta	Relevan karena menguatkan peran teknologi dalam mendukung

	I., & Lyeonov, S. (2023)			faktor pendukung seperti teknologi digital, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat.	transparansi dan partisipasi publik.
12	Nimko, O., Ohorodnyk, V., Dankevych, V., & Doronina, I. (2024)	<i>E-governance and Corruption Perception: Global Insights and Ukraine's Context During War and Displacement</i>	Kuantitatif	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan e-governance dapat menurunkan persepsi korupsi, terutama dalam kondisi krisis seperti perang dan perpindahan penduduk.	Relevan karena menyoroti hubungan antara transparansi digital dan akuntabilitas dalam konteks global yang dinamis.
13	Wardana, I. G. N. W., & Prabawati, N. P. A. (2024)	Efektivitas pelayanan publik dalam perspektif good governance di era digital	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik meningkatkan efektivitas layanan melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.	Relevan karena mendukung peran teknologi dalam memperkuat prinsip good governance.
14	Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024)	Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika administrasi publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan good governance, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas birokrasi.	Relevan karena memperkuat dimensi normatif good governance yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis terhadap 14 artikel tersebut, ditemukan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam implementasi good governance di berbagai konteks global. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa transparansi berperan dalam meningkatkan akses informasi dan mengurangi praktik korupsi, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital seperti e-governance. Akuntabilitas terbukti menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun organisasi. Sementara itu, partisipasi publik berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta legitimasi kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi ketiga prinsip tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti kapasitas institusi, tingkat perkembangan teknologi, dan kondisi sosial-politik masing-masing negara. Dengan demikian, penerapan good governance tidak hanya bergantung pada satu prinsip saja, melainkan pada sinergi antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara simultan.

B. Diskusi

Pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bahwa good governance memiliki peran strategis dalam mendorong berbagai aspek pembangunan global, terutama dalam konteks keberlanjutan. Murshed (2024) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola yang baik mampu memperkuat hubungan antara transisi energi terbarukan dan pertumbuhan ekonomi hijau, sehingga memperlihatkan bahwa governance menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan kebijakan lingkungan. Temuan ini diperkuat oleh Saha et al. (2024) yang menegaskan bahwa kualitas governance suatu negara memoderasi hubungan antara praktik Sustainable Development Goals (SDGs) dan kinerja keuangan, sehingga menunjukkan pentingnya tata kelola dalam skala makro. Selain itu, Correa-Mejía et al. (2024) menyoroti bahwa corporate governance berperan penting dalam menentukan prioritas SDGs di negara berkembang melalui pendekatan strategis berbasis 5P. Dengan demikian, ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa good governance tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan berkelanjutan global.

Dalam konteks pelayanan publik, penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas layanan. Handayani et al. (2023) menemukan bahwa penerapan good governance dan partisipasi publik mampu meningkatkan kinerja pelayanan desa secara signifikan, khususnya dalam meningkatkan responsivitas dan efektivitas layanan. Hal ini sejalan dengan Wardana dan Prabawati (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik berbasis prinsip good governance mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan. Di sisi lain, Choirulsyah dan Azhar (2024) menekankan bahwa etika administrasi publik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik, terutama dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas birokrasi. Ketiga penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik di berbagai level pemerintahan.

Lebih lanjut, penerapan good governance dalam konteks sektoral juga menunjukkan hasil yang signifikan, khususnya dalam sektor lingkungan dan kesehatan. Benzaken et al. (2022) mengungkapkan bahwa keberhasilan pengelolaan ekonomi biru di Seychelles sangat dipengaruhi oleh praktik tata kelola yang baik, termasuk koordinasi lintas sektor dan partisipasi pemangku kepentingan. Sementara itu, Maugeri et al. (2023) menemukan bahwa indikator governance memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat resistensi antimikroba di negara-negara Eropa, yang menunjukkan bahwa tata kelola yang baik juga berkontribusi pada hasil kesehatan masyarakat. Selain itu, Haghighi dan Takian (2024) mengembangkan kerangka institusionalisasi good governance dalam sektor kesehatan yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa good governance memiliki dampak lintas sektor yang luas dan krusial dalam meningkatkan kualitas pembangunan.

Dalam konteks kelembagaan global, penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance tetap relevan bahkan dalam sistem yang tidak sepenuhnya demokratis. Hafner-Burton et al. (2025) menjelaskan bahwa organisasi internasional yang bersifat otokratis tetap mengadopsi prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti akuntabilitas dan transparansi bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai sistem politik. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa tekanan global dan kebutuhan akan legitimasi internasional mendorong organisasi untuk

mengadopsi praktik tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian, good governance tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis dalam pengelolaan organisasi global.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi good governance. Akpan-Obong et al. (2023) menemukan bahwa e-governance mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan, meskipun belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas di semua negara. Hal ini diperkuat oleh Kuzior et al. (2023) yang mengidentifikasi bahwa e-governance dalam smart cities menjadi enabler utama dalam meningkatkan partisipasi publik dan efektivitas kebijakan. Sementara itu, Nimko et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan e-governance berkontribusi dalam menurunkan persepsi korupsi, terutama dalam situasi krisis seperti konflik dan perpindahan penduduk. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki peran strategis dalam memperkuat prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

Selain itu, hubungan antara good governance dan isu perubahan iklim juga menjadi perhatian dalam penelitian terdahulu. Toukabri dan Mohamed Youssef (2023) menemukan bahwa corporate governance berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pengungkapan perubahan iklim dan pencapaian SDGs. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan lingkungan serta akuntabilitas perusahaan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa good governance tidak hanya relevan dalam sektor publik, tetapi juga dalam sektor privat. Dengan demikian, integrasi prinsip good governance dalam berbagai sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami good governance, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan systematic literature review bergantung pada ketersediaan dan kualitas artikel yang diakses, sehingga potensi bias seleksi tetap ada. Kedua, pembatasan tahun publikasi antara 2022 hingga 2026 dapat menyebabkan terlewatnya penelitian relevan yang diterbitkan sebelum periode tersebut. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dan sektoral, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan integrasi komprehensif antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam satu kerangka global. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkombinasikan pendekatan empiris dan komparatif lintas negara guna memperkaya pemahaman mengenai implementasi good governance secara lebih holistik.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan good governance dalam perspektif global. Hasil systematic literature review mengindikasikan bahwa ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik tata kelola pemerintahan yang efektif. Transparansi berperan dalam membuka akses informasi dan mengurangi potensi korupsi, akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik, sementara partisipasi publik meningkatkan legitimasi serta kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan good governance dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual seperti

kapasitas institusi, perkembangan teknologi, dan kondisi sosial politik suatu negara. Dengan demikian, keberhasilan implementasi good governance sangat bergantung pada integrasi ketiga prinsip tersebut secara simultan dalam berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.

Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan konsep good governance. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa good governance harus dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi, bukan sekadar kumpulan prinsip yang berdiri sendiri. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital seperti e-governance dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan kapasitas institusi serta peningkatan literasi masyarakat untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi tata kelola yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan systematic literature review bergantung pada ketersediaan dan akses terhadap artikel ilmiah, sehingga terdapat kemungkinan bias seleksi. Kedua, pembatasan periode publikasi pada tahun 2022 hingga 2026 berpotensi mengabaikan penelitian penting yang terbit di luar rentang waktu tersebut. Ketiga, sebagian besar penelitian yang dianalisis berfokus pada konteks sektoral tertentu sehingga belum sepenuhnya menggambarkan integrasi prinsip good governance secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan waktu, menggunakan pendekatan empiris lintas negara, serta mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi lebih dalam peran teknologi digital dan faktor budaya dalam memperkuat implementasi good governance.

REFERENSI

- Akpan-Obong, P. I., Trinh, M. P., Ayo, C. K., & Oni, A. (2023). E-governance as good governance? Evidence from 15 West African countries. *Information Technology for Development, 29*(2–3), 256–275. <https://doi.org/10.1080/02681102.2022.2123770>
- Benzaken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022). Good governance for sustainable blue economy in small islands: Lessons learned from the Seychelles experience. *Frontiers in Political Science, 4*, 1040318. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1040318>
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi etika administrasi publik: Langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9*(3), 195–203. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>
- Correa-Mejía, D. A., García-Benau, M. A., & Correa-García, J. A. (2024). The critical role of corporate governance in sustainable development goals prioritisation: A 5 Ps-based analysis for emerging economies. *Heliyon, 10*(3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25480>

- Hafner-Burton, E., Pevehouse, J. C., & Schneider, C. J. (2025). Good governance in autocratic international organizations. *The Review of International Organizations*, 20(2), 323–356. <https://doi.org/10.1007/s11558-024-09550-7>
- Haghighi, H., & Takian, A. (2024). Institutionalization for good governance to reach sustainable health development: A framework analysis. *Globalization and Health*, 20(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s12992-023-01009-5>
- Halim, M. A., & Osmani, N. M. (2023). Good governance in western and Islāmic traditions: A comparative study. *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)*, 7(2), 312–329. <https://doi.org/10.31436/alrisalah.v7i2.469>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Handoyo, S. (2023). Worldwide governance indicators: Cross country data set 2012–2022. *Data in Brief*, 51, 109814. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109814>
- Ikhsan, Z., Laode, R. T., Satyadharma, M., & Susanti, N. (2025). Implementasi prinsip good governance dalam mendorong optimalisasi layanan publik (tinjauan literatur). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17157664>
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2024). The worldwide governance indicators: Methodology and 2024 update. Available at SSRN 5154675. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5154675>
- Kuzior, A., Pakhnenko, O., Tiutiunyk, I., & Lyeonov, S. (2023). E-governance in smart cities: Global trends and key enablers. *Smart Cities*, 6(4), 1663–1689. <https://doi.org/10.3390/smartcities6040078>
- Massey, A. (2022). Sustainable development goals and their fit with good governance. *Global Policy*, 13, 79–85. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13037>
- Maugeri, A., Barchitta, M., Puglisi, F., & Agodi, A. (2023). Socio-economic, governance and health indicators shaping antimicrobial resistance: An ecological analysis of 30 European countries. *Globalization and Health*, 19(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s12992-023-00913-0>
- Murshed, M. (2024). Can renewable energy transition drive green growth? The role of good governance in promoting carbon emission-adjusted economic growth in Next Eleven countries. *Innovation and Green Development*, 3(2), 100123. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100123>
- Naseer, M. M., Hunjra, A. I., Palma, A., & Bagh, T. (2025). Sustainable development goals and environmental performance: Exploring the contribution of governance, energy, and growth. *Research in International Business and Finance*, 73, 102646. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102646>
- Nimko, O., Ohorodnyk, V., Dankevych, V., & Doronina, I. (2024). E-governance and corruption perception: Global insights and Ukraine's context during war and displacement. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(3). <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.223.244>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Patel, J., Harant, A., Fernandes, G., Mwamelo, A. J., Hein, W., Dekker, D., & Sridhar, D. (2023). Measuring the global response to antimicrobial resistance, 2020–21: A systematic governance analysis of 114 countries. *The Lancet Infectious Diseases*, 23(6), 706–718. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(22\)00796-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00796-4)
- Saha, S., Hasan, A. R., Islam, K. R., & Priom, M. A. I. (2024). Sustainable development goals (SDGs) practices and firms' financial performance: Moderating role of country governance. *Green Finance*, 6(1), 162–198. <https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/GF.2024007>
- Sari, A. R. (2023). The impact of good governance on the quality of public management decision making. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 39–46. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21>
- Singh, A. (2023). A theoretical understanding of governance and good governance. *VIDYA-A Journal of Gujarat University*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.47413/vidya.v2i1.125>
- Toukabri, M., & Mohamed Youssef, M. A. (2023). Climate change disclosure and sustainable development goals (SDGs) of the 2030 agenda: The moderating role of corporate governance. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 21(1), 30–62. <https://doi.org/10.1108/JICES-02-2022-0016>
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2023*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Wardana, I. G. N. W., & Prabawati, N. P. A. (2024). Efektivitas pelayanan publik dalam perspektif good governance di era digital. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(6). <https://doi.org/10.61292/shkr.178>

- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/j9r94371>
- World Bank. (2023). *Worldwide governance indicators*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>